

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan pelaksanaan desentralisasi didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Melalui pelaksanaan desentralisasi, fungsi pemerintah tertentu dilimpahkan kepada pemerintahan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah didalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan essensi kebijakan otonomi daerah yang bergulir dewasa ini merupakan wujud dari kewenangan dalam bidang keuangan daerah. Kebijakan otonomi daerah itu dimaksudkan untuk semakin mendekatkan pemerintahan kepada masyarakatnya agar pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik. dengan semakin mendekatkannya pemerintahan kepada masyarakat diharapkan pemerintah akan mampu memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dibanding bila diformulasikan secara sentralistis (Suparmoko, 2002).

Otonomi daerah dengan berbagai harapan yang terdapat di dalamnya bukan lagi hanya merupakan suatu retorika belaka namun telah menjadi realita yang harus ditangani dengan semangat untuk semakin memajukan kehidupan masing-masing daerah dalam suatu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dengan harapan yang ada di dalamnya harus senantiasa disikapi dengan kerja keras agar semua harapan yang diinginkan dengan adanya kebijakan otonomi daerah dapat segera terwujud. Efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dengan pemerintahan daerah, memperhatikan potensi dan keanekaragaman dari daerah dan memperhatikan adanya peluang dan tantangan persaingan global. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Otonomi daerah telah membawa implikasi didalam penyelenggaraan tugas daerah. Pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga pembiayaan pembangunan secara bertahap akan menjadi beban terhadap pemerintah daerah.

Keadaan ini akan semakin memperkuat tekanan internal dari keuangan daerah, karena peranan sumbangan dan bantuan pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah akan semakin kecil. Bantuan pusat dalam pembiayaan pembangunan hanya akan diberikan untuk menunjang pengeluaran pemerintah, khususnya untuk belanja pegawai dan program-program pembangunan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan kesiapan dana (*financial*) yang relatif cukup besar, sehingga daerah diharapkan mampu menggali berbagai potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD terdiri dari : (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) bagian lain BUMD, (4) penerimaan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan asli daerah (PAD) dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur kemampuan suatu daerah. Semakin besar kontribusi yang

diberikan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan di daerahnya sendiri dan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Selain itu, komponen didalam penerimaan PAD adalah berasal dari retribusi daerah. Sebagai salah satu komponen sumber PAD, retribusi daerah berfungsi sebagai dana bebas daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan daerah (Suparmoko, 2002). Sebagai instrumen kebijakan fiskal, retribusi daerah mempunyai beberapa kemampuan strategis yang mencerminkan manfaat dari retribusi itu sendiri didalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Manfaat tersebut adalah (1) retribusi daerah dapat meningkatkan kemampuan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Retribusi daerah agar dapat berfungsi secara efisien dan efektif, maka tidak saja perhitungan secara ekonomis dan fisik, namun juga harus didukung oleh peningkatan kesadaran dan peran aktif yang cukup tinggi dari masing-masing orang atau masyarakat sebagai wajib retribusi atau jasa yang telah diperoleh.

Oleh karena itu, retribusi juga penting didalam pengelolaan keuangan daerah. Di dalam TAP MPR No. IV/MPR/2000 ditegaskan bahwa *“kebijakan desentralisasi Daerah diarahkan untuk mencapai peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas Pemda, keselarasan hubungan antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah itu sendiri dalam kewenangan dan keuangan untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan serta penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian Daerah”*. Sebagai

konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas, maka sumber-sumber keuangan telah banyak yang bergeser ke daerah. Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan (1) Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tetap mendasarkan batas kewajaran. (2) Didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Retribusi dengan demikian merupakan salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu komponen utama didalam PAD adalah berasal dari retribusi. Kontribusi yang diberikan oleh retribusi daerah terhadap PAD di Kota Padang masih rendah.

Pemerintahan daerah dengan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Berdasarkan data yang di peroleh, laju pertumbuhan ekonomi meningkat dari sebesar 5,47 persen pada tahun 2010, menjadi sebesar 6,23 persen pada tahun 2011. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi sebesar 6,16 persen, Lebih lanjut, pada tahun 2013, laju pertumbuhan ekonomi juga meningkat menjadi sebesar 6,66 persen hingga khir tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kota Padang sebesar 6,21 persen. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di Kota Padang.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Realisasi Restribusi Daerah Kota Padang tahun 2002-2016**

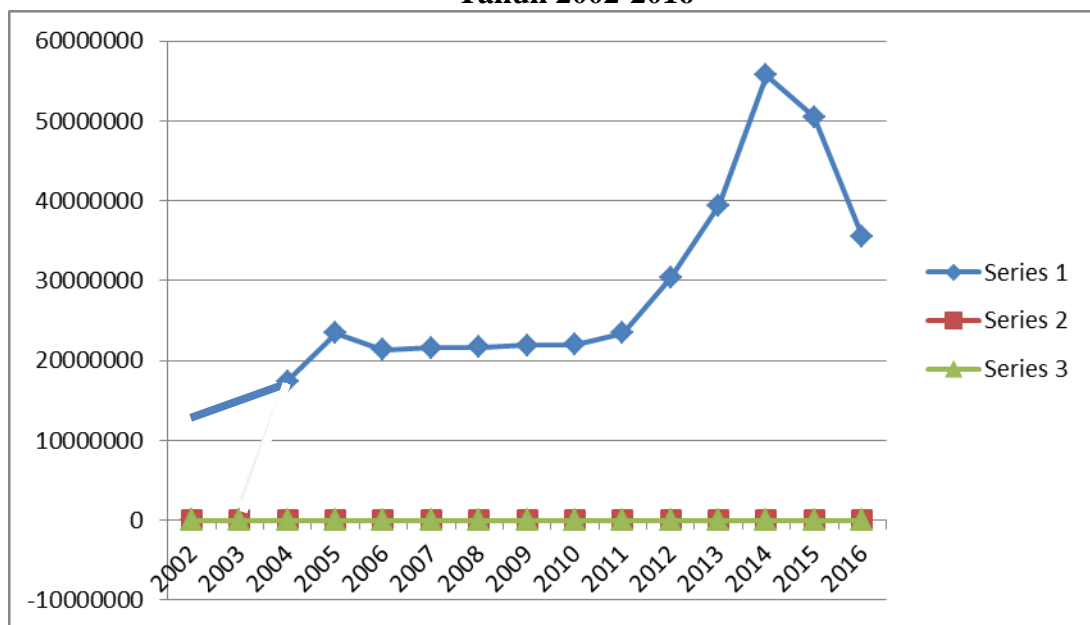
No	Tahun	Retribusi (RibuRupiah)	(Presentase)	Naik	Turun
1	2002	14.334.241,00	0%	-	-
2	2003	15.551.160,00	8%	✓	
3	2004	17,421,132.00	11%	✓	
4	2005	23,449,590.00	26%	✓	
5	2006	21,378,620.00	-10%		✓
6	2007	21,565,470.00	1%	✓	
7	2008	21,667,450.00	0%	-	-
8	2009	21,898,300.00	1%	✓	
9	2010	21,985,780.00	0%	-	-
10	2011	23,457,000.00	6%	✓	
11	2012	30,325,980.00	23%	✓	
12	2013	39,409,960.00	23%	✓	
13	2014	55,736,710.00	29%	✓	
14	2015	50,512,577.72	-10%		✓
15	2016	35,517,013.98	-42%		✓
	Jumlah	414,210,984.70			
	Rata-rata	27,614,065.65			

Sumber : BPS, Kota Padang Dalam Angka (2002-2016)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah pada tahun 2016 sebesar Rp.35.517.013.98 atau 2,47 persen dari total penerimaan pendapatan daerah yang sebesar Rp. 1.969.812.077.716,92 Apabila dibandingkan dengan pajak daerah yang sebesar 14,7 persen dan komponen lain-lain yang sebesar 5,68 persen yang didalamnya itu mencakup pendapatan yang berasal dari dinas-dinas daerah serta pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah, seperti jasa giro, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dinas,

penjualan rumah dinas, penjualan barang bekas, pembinaan dan pengawasan pasar grosir dan atau pertokoan dan pendapatan lainnya, retribusi daerah hanya memberikan kontribusi ketiga terbesar dari komponen sumber penerimaan PAD. Padahal menurut makna dari desentralisasi fiskal, sumber utama dari PAD adalah berasal dari pajak dan retribusi daerah. Dari fakta tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan dari retribusi daerah masih belum maksimal.

**Tabel 1.2**  
**Grafik Perkembangan Realisas Restribusi Daerah Kota Padang**  
**Tahun 2002-2016**



Sumber ; Hasil Pengolahan angka (2002-2016)

Berdasarkan Grafik diatas menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah dari tahun 2002 sampai 2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2002 realisasi retribusi daerah sebesar Rp. 14.334.241,00 ribu meningkat menjadi Rp. 15.551.160,00 ribu pada tahun 2003 dengan pertumbuhan sebesar 8,49 persen

dan terus meningkat hingga akhir tahun 2005 dengan realisasi retribusi mencapai Rp.23.449.590,00 ribu dengan pertumbuhan mencapai 34,60 persen, namun pada tahun 2006 realisasi retribusi di kota Padang mengalami penurunan sebesar 8,83 persen. Pada tahun 2007 nilai realisasi mencapai Rp. 21.565.470,00 ribu dengan pertumbuhan mencapai 0,87 persen. Pada tahun 2008 realisasi Retribusi daerah kota Padang mencapai Rp.21.667.450,00 ribu atau sekitar 0,47 persen. Dimana pada tahun 2008 kota Padang di landa bencana gempa, sehingga banyak pembayaran retribusi yg tidak terlaksana. hingga akhir tahun 2016 realisasi retribusi daerah di kota Padang mencapai Rp. 35.517.013,89 ribu (BPS Kota Padang Dalam Angka, 2002 – 2016).

Kenyataan yang ada, antara potensi yang ada di lapangan dibanding realisasi penerimaan retribusi terdapat ketimpangan. Ada kecenderungan bahwa dengan semakin meningkatnya target penerimaan retribusi, maka persentase efektivitasnya cenderung mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi dari retribusi perlu digali secara maksimal dan salah satunya melalui peningkatan kinerja pemungutannya. Besar kecilnya penerimaan retribusi daerah sangat bergantung kepada besar kecilnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pungutan retribusi daerah. Setiap tahun didalam anggaran pemerintahan daerah, ditetapkan target penerimaan retribusi daerah yang harus dicapai. Pencapaian target retribusi daerah akan menjadi salah satu ukuran kinerja keuangan daerah tersebut. Untuk pencapaian secara efektif diperlukan kinerja yang optimal terhadap penerimaan retribusi daerah.

Selain itu faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah di Kota Padang adalah menetapkan penerimaan retribusi pajak kendaraan bermotor, serta efektivitas pemungutan pelayanan retribusi, berdasarkan hasil penelitian selama kurun waktu tahun 2002 – 2011, kapasitas retribusi sebesar 66%, demikian mengidentifikasi cukup besar penerimaan untuk di tingkatkan penerimaannya. Sumber : Dispenda, Kota Padang Dalam Angka (2002-2011)

Sedangkan perkembangan jumlah penduduk di kota Padang tahun 2002 sampai 2016 mengalami keadaan yang berfluktuasi. Pada tahun 2002 jumlah penduduk kota padang berjumlah 734.421 meningkat menjadi 765.450 jiwa atau meningkat sebesar 4,22 persen pada tahun 2003. Pada tahun 2004 jumlah penduduk kota padang sebanyak 801.344 jiwa atau meningkat sekitar 2,52 persen, namun pada tahun 2010 terjadi penurunan peningkatan jumlah penduduk sebesar 4,82 persen sehingga jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 833.562 jiwa. Hingga akhir tahun 2016 jumlah penduduk di Kota Padang sebanyak 914.968 jiwa atau meningkat sekitar 1,39 persen (BPS. Kota Padang Dalam Angka 2002-2016).

Selanjutnya factor yang mempengaruhi retribusi daerah kota padang adalah luas lahan parkir. Berdasarkan data dari BPS Kota Padang mengalami peningkatan pada tahun 2002 luas lahan parkir yang ada di Kota Padang adalah 131,15 ribu M<sup>2</sup> meningkat menjadi 724,38 M<sup>2</sup> pada tahun 2005 sedangkan pada tahun 2008 luas lahan parkir di Kota Padang mencapai 100,8 ribu M<sup>2</sup> dan hingga akhir tahun 2017 luas lahan parkir di Kota Padang mencapai 241,075 ribu M<sup>2</sup>.

Untuk itu Kota Padang diharapkan dapat mengatur dan mengelola keuangannya sehingga dapat meningkatkan pendapatannya. sehingga bisa



mensejahterahkan masyarakat dan pembangunan daerahnya. ( UU no.32 Tahun 2004 ) Berdasarkan latar belakang diatas menarik untuk dilakukan penelitian, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah dan apakah kebijakan otonomi daerah juga berpengaruh terhadap penerimaan retribusi

**Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Padang”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, Dsar teori dan Logia berfikir yang daerah di Kota Padang, untuk itu peneliti tertarik mengambil judul “ **Analisis**

di kembangkan, maka Rumusan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap peneriman retribusi di Kota Padang?
2. Seberapa besar pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan retribusi di Kota Padang.?
3. Seberapa besar pengaruh Luas Lahan Parkir terhadap penerimaan retribusi daerah di Kota Padang?

## **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap peneriman retribusi di Kota Padang.

2. Untuk menganalisis pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan retribusi di Kota Padang.
3. Untuk menganalisis pengaruh Luas Lahan Parkir terhadap penerimaan retribusi daerah di Kota Padang.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah

:

1. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam hal pengenaan pungutan retribusi daerah sehingga dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal searah dengan tujuan awal yang diharapkan yaitu pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal di Kota Padang.
2. Kemudian penelitian ini diharapkan juga dapat membuka wacana mengenai pentingnya peran masyarakat untuk mendukung optimalisasi retribusi daerah dan potensinya terhadap keuangan daerah dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi di daerahnya.
3. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat sebagai penambah wawasan tentang retribusi daerah. Selain itu dapat digunakan juga sebagai bahan masukan untuk penelitian yang terkait dengan hasil penelitian ini.

## **1.4 Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta hipotesis penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi mengenai tentang kajian teori yang berhubungan dengan PAD dan retribusi daerah serta berisi tentang kerangka konseptual serta penelitian terdahulu.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai metodologi penelitian, lokasi penelitian, uji regresi linear berganda dan uji asumsi klasik.

### **BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang mengenai keadaan geografis, penerimaan retribusi, dan perkembangan di kota Padang

### **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil estimasi, regresi linear berganda, asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, hasil koefisien Determinasi. Hasil t-statistik, f-statistik, dan pembahasan.

### **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan daftar pustaka